

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Adinugroho, Wahyu Catur, 2009, *Penebangan Liar (Illegal Logging), Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung terselesaikan*, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Apeldoorn, van, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Empat, Pradnya Paramita, Jakarta.

Ashofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Effendy, Marwan, 2010, *Prospek Penegakan Hukum Lingkungan*, Kementrian 57, Jakarta.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Garner, 1999, *Black Law Dictionary*, West Group, Dallas.

Hartini, Rahayu, 2012, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Citra Mentari, Malang.

Hidayati, Rahmi dkk, 2006, *Pemberantasan Illegal Logging Dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Wana Aksara, Banten.

Huijbers, Theo, 1984, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.

Joachim, Friedrich Carl, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.

Margono, 2012, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, PT Sinar Grafika, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian hukum Cet-1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono, 2000, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.

Purwosutjipto, H.M.N, 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, PT Cipta Aditya Bakti, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT Rajawali Pers, Jakarta.

Subana dan Sudrajat, 2005, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Pustaka Setia, Bandung.

Subekti, 1963, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oerikartawinata, 1995, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

Wery, Paul Leonard, 1990, *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Nederland*, Percetakan Negara RI, Jakarta.

2. Jurnal

Bawono, Bambang Tri dan Anis Mashdurohatun, “Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya”, *Jurnal Hukum* Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 590-611

Danindra, Praditia, “Perampasan dan Pengembalian Barang Bukti Alat Angkut Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Pengadilan Negeri Purbalingga, Kabupaten Purbalingga)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm 119-128.

Dewi, Ida Ayu Ratna Narlita dan Diah Ratna Sari Hariyanto, “Analisa Penegakan Hukum Illegal Logging Dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 9, Nomor 11, 2021, Universitas Udayana, Bali, hlm. 2062-2071.

Subiharta, “Tolok Ukur Keadilan”, *Majalah DANDAPALA* Volume IX Edisi 52 Maret-April 2023, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 63-65

Felia, Syerra dan Fani Budi Kartika, “Tindak Pidana *Illegal Logging* Ditinjau dari Prespektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Lex Justitia*, Volume 1, Nomor 2, Juni 2019, Universitas Potensi Utama, Medan, hlm 186-195

Haloho, Roby Darwis dkk, “Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Angkutan Terhadap Barang Niaga Melalui Darat (Studi PT. Jasa Tunas Agung, Jl. Sempurna Ujung No. 148 Medan)”, *Patik : Jurnal Hukum*, Volume 07, Nomor 3, Desember 2018, Universitas HKBP Nommensen, Medan, hlm. 178-191

Irawan, Rendi Rezki, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Pemilik Alat Angkut Dalam Pengangkutan Kayu Ilegal”, *Unes Journal of Swara Justisia*, Volume 2, Issue 3, Oktober 2018, Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 318-331

Kartodiharjo, Haryadi, “Modus Operandi, Scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging”, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003.

Mahmodin, Mohammad Mahfud, “Keniscayaan Reformasi Hukum : Upaya Menjaga Jati Diri Dan Martabat Bangsa”, Makalah dalam Konvensi Kampus VI dan Temu Tahunan XII Forum Rektor Indonesia (FRI), 2010, Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Nur, Zulfahmi, “Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)”, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Volume 6, Nomor 2, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2023, hlm. 247-271

Sumadi, Ahmad Fadlil, “Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Kenegaraan”, 2015, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, hlm. 849-871.

Wijayanta, Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 2014, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 216-226

3. Disertasi

Ali, Febrian, 2023, Rekonstruksi Pengaturan Status Hukum Barang yang Dijaminkan Dengan Fidusia yang Dirampas Oleh Negara Yang Berbasis Nilai Keadilan, Disertasi Doktorat, Tidak dipublikasikan, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, [02/2023], <http://repository.unissula.ac.id/30960/1/10302000369.pdf>, [18/06/2024].

4. Pidato

Jenie, Siti Ismijati, “Itikad Baik, Perkembangan dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2007

5. Wawancara

Arliansyah, Redo, 2024, Penerapan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Kehutanan Menurut Sudut Pandang Seorang Jaksa, *Wawancara*, Jakarta

Kusumaningrum, Dinar Aulia, 2024, Analisis Putusan Perampasan Alat Angkut Milik Pihak Ketiga, *Wawancara*, Jakarta

Tampubolon, Laurenz Stephanus, 2024, Pandangan Hakim dalam Menginterpretasikan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Kehutanan, *Wawancara*, Depok

Telaumbanua, Kasianus, 2024, Pandangan Hakim dalam Menginterpretasikan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Kehutanan, *Wawancara*, Jakarta

Wicaksono, Bayu, 2024, Penerapan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Kehutanan Menurut Sudut Pandang Seorang Advokat, *Wawancara*, Jakarta

6. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan

Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Reglemen Acara Perdata [*Staatsblad* 1847-52 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1849-63]

Reglemen Indonesia Baru [*Staatsblad* 1847-16]

Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura [*Staatsblad* 1927-227]

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209]

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, [Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214]

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, [Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674]

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan [Lembaran Negara Nomor 86 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412]

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan [Lembaran Negara Nomor 130 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432]

7. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVII/2019

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 810/Pid.Sus/2019/PN Mks

8. Lain-lain

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-03/B/B.5/8/1998 tentang Penyelesaian Barang Rampasan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan